

**PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI
DETERMINAN ALOKASI BELANJA MODAL PADA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE 2016-2020**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

NUR WIDIYANINGSIH

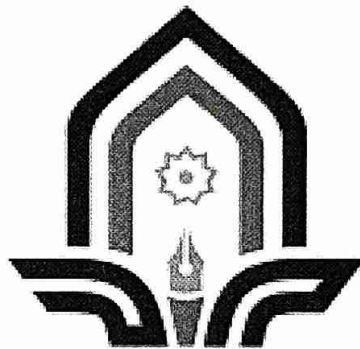
NIM 4319020

**PROGAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI
DETERMINAN ALOKASI BELANJA MODAL PADA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE 2016-2020**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

NUR WIDIYANINGSIH

NIM 4319020

**PROGAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Widiyaningsih

NIM : 4319020

Judul Skripsi : **Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi
Determinan Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Periode 2016-2020**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Nur Widiyaningsih
Nur Widiyaningsih

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Nur Widiyaningsih

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

Nama : **Nur Widiyaningsih**
NIM : **4319020**
Judul Skripsi : **Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi
Determinan Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Periode 2016-2020**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Juni 2023
Pembimbing,


Pratomo Cahyo Kurniawan, M.AK.
NIP.198907082020121010



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **Nur Widiyaningsih**
NIM : **4319020**
Judul Skripsi : **Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi
Determinan Alokasi Belanja Modal Pada
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Periode
2016-2020**
Dosen Pembimbing : **Pratomo Cahyo Kurniawan, M.Ak.**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Muhammad Aris Safi'i, M.E.I.
NIP 198510122015031004

Penguji II

Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si.
NIP 199101092020122016

Pekalongan, 14 Juli 2023
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H.
NIP 197502201999032001

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Toyo dan Ibu Karsiti yang senantiasa memberikan Doa Restu, Pengorbanan, Kasih sayang, dukungan serta support terbaik selama ini.
2. Keluarga saya terutama kakak saya Esenur Chotimah dan keluarga besar Bapak Suradi dan Ibu Taryonah yang senantiasa selalu memberikan support terbaik juga dalam proses penyelesaian skripsi.
3. Almamater saya Segenap Civitas akademika Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Bapak/Ibu Dosen pengajar yang telah kebersamai selama perkuliahan berlangsung

4. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Novendi Arkham Mubtadi, M.Akun dan Bapak Pratomo Cahyo Kurniawan, M.AK. yang senantiasa Memberikan bimbingan serta memberikan support terbaik dalam proses pembuatan skripsi.
5. Dosen Wali Bapak Dr. AM.M. Hafidz MS, M.Ag yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingannya selama ini.
6. Teman – Teman Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Studi Pasar Modal Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Teman – Teman Generasi Baru Indonesia Komisariat UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta Bank Indonesia Tegal yang telah memberikan pengalaman organisasi terbaik selama menjalani proses perkuliahan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Sahabat Tercinta, Teman seperjuangan Rongsok Botol yang telah kebersamai selama 4 tahun ini.
8. Teman-teman seluruh angkatan Prodi Akuntansi syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

MOTTO

*The Future is today, Masa depan itu adalah milik mereka yang
mempersiapkannya hari ini.*

Najwa Shihab

Musuh terbesar dalam hidup adalah Dirimu Sendiri...

Life With Allah & Rasulallah

Nur Widiyaningsih

ABSTRAK

Nur Widiyaningsih. Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi Determinan Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Periode 2016-2020.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan utama daerah yang diperoleh melalui pemanfaatan kekayaan yang dimiliki daerah. Semakin besar kekayaan yang dimiliki suatu daerah maka semakin besar pula potensi penerimaan PAD oleh masing-masing daerah. Berbeda dengan PAD, DAU, DAK dan DBH merupakan dana yang diperoleh daerah melalui transfer dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu daerah yang memiliki masalah terkait ketimpangan pendapatan. Beberapa tahun terakhir sejak tahun 2016 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki permasalahan yakni adanya ketimpangan pendapatan penduduk perkotaan dan pedesaan. Adanya ketimpangan ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang ada di kepulauan riau diindikasikan hanya dinikmati Sebagian kecil masyarakat yang berada di golongan menengah ke bawah. Ketimpangan yang berkepanjangan akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pula pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Hal ini kemudian mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Penelitian ini termasuk dalam penelirtian kuantitatif dengan objek penelitian adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2020. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data sekunder. Teknik penarikan sampel menggunakan sampel jenuh dimana dari sampel yang ada yakni 7 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan periode yang digunakan selama 5 tahun yakni 2016-2020. Dengan demikian jumlah sampel penelitian sebanyak 35 data. Penelitian ini menggunakan Analisis data uji regresi dengan menggunakan progam software Eviews versi 12.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan melalui uji MRA menunjukkan variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, DBH, Pertumbuhan Ekonomi

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. Tamamudin, M.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ade Gunawan, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Pratomo Cahyo Kurniawan, M.AK. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Dr. AM. M. Hafidz MS, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
7. Bapak M. Aris Safi'I, M.E.I. dan Ibu Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si. selaku dosen penguji.

8. Pihak Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan
9. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 20 Juni 2023



Nur Widiyaningsih

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
P E N G E S A H A N.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	12
D. Sistematika pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Landasan Teori.....	15
B. Telaah Pustaka.....	27
C. Model Penelitian	33
D. Hipotesis.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Setting Penelitian.....	40
C. Teknik Penarikan Sampel.....	40
D. Variabel Penelitian	41
E. Sumber Data.....	44

F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Metode Analisis Data	45
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Deskripsi Profil Objek Penelitian.....	50
B. Analisis Statistik Deskriptif	51
C. Uji Estimasi Regresi Data Panel	53
D. Uji Asumsi Klasik	56
E. Uji Kelayakan Model Regresi	59
F. Uji Moderated Regression Analysis (MRA).....	62
G. Pembahasan Hasil Penelitian	64
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Telaah Pustaka	27
Tabel 3. 1 Nama Kab/Kota Provinsi Kepri	41
Tabel 3. 2 Operasional Variabel.....	43
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	52
Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow.....	54
Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman	54
Tabel 4. 4 Hasil Uji Langrange Multiplier.....	55
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas sebelum dilakukan tranformasi data	56
Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas setelah dilakukan tranformasi data	57
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan tranformasi data.....	58
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinearitas.....	58
Tabel 4. 9 Hasil Uji R-Square	59
Tabel 4. 10 Hasil Uji t	60
Tabel 4. 11 Hasil Uji F	61
Tabel 4. 12 Hasil Uji MRA X1	62
Tabel 4. 13 Hasil Uji MRA X2	62
Tabel 4. 14 Hasil Uji MRA X3	63
Tabel 4. 15 Hasil Uji MRA X4.....	63
Tabel 4. 16 Anggaran PAD Provinsi Kepulauan Riau.....	64
Tabel 4. 17 Anggaran DAU Provinsi Kepulauan Riau	67
Tabel 4. 18 Realisasi DAK Provinsi Kepulauan Riau Tahun	70
Tabel 4. 19 Realisasi DBH Provinsi Kepulauan Riau.....	72

Tabel 4. 20 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020.....	5
Gambar 2. 1 Model Penelitian	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Laporan Keuangan Povinsi Kepri 2016-2020.....	I
Lampiran 2 Uji Estimasi Model Regresi.....	II
Lampiran 3 Uji Normalitas	IV
Lampiran 4 Uji Hipotesis & Uji Simultan	V
Lampiran 5 Uji <i>Moderated Regression Analysis</i>	VI
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup Penulis.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden Habibie yang pada saat menjadi pemimpin sementara saat peralihan kepemimpinan Presiden Soeharto lengser dari kepemimpinannya pada tahun 1998, memulai proses pembentukan otonomi daerah di Indonesia. Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden Habibie memutuskan dua keputusan politik yang penting. Hasil dari keputusan yang telah ditetapkan tersebut kemudian membentuk gagasan serta perspektif baru di dalam politik dan pemerintahan yaitu terkait dengan demokrasi, keadilan dan kebebasan yang disertakan ke dalam struktur tatanan penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ataupun sistem otonomi daerah sendiri sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Namun demikian sebagaimana zaman semakin berkembang seiring dengan kemajuan yang ada perubahan akan tetap terus ada. UU yang mengatur terkait otonomi daerah ini muncul pertama kali yaitu UU No. 1 tahun 1945 kemudian terus mengalami perubahan untuk mencapai kesempurnaan, dan tercetuslah UU No. 22 hingga direvisi dan diperbarui lagi dan terakhir menjadi UU No. 32 Tahun 2004. UU inilah yang kemudian dimaksud oleh presiden Habibie yang di implementasi oleh pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan kemajuan daerah melalui kemandirian daerah yang kita kenal dengan otonomi daerah. Dari sini kemudian Otonomi Daerah dikenal oleh masyarakat luas (Sinaga, 2020).

Otoritas pemerintah daerah kini memiliki banyak hak dan kewenangan untuk mengoperasikan dana yang berasal dari penerimaan daerahnya secara penuh karena adanya otonomi. Dilaksanakannya otonomi daerah menjadikan Otoritas penda berwenang sepenuhnya menentukan bagaimana menggunakan sumber pendapatan yang sudah diterima daerah. Hal ini tentunya berdampak positif bagi Pemerintah Daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan kewenangan penuh untuk mengelola keuangan daerah artinya Pemerintah daerah memiliki kesempatan yang maksimal untuk menggunakan penerimaan dana yang telah diperoleh untuk digunakan sebaik-baiknya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin besar sumber daya yang dimiliki semakin besar pula PAD yang diperoleh oleh daerah. Maka dari itu penda haruslah mampu mengelola secara maksimal SDA yang dimiliki oleh setiap daerah dikarenakan PAD menjadi sumber utama penerimaan daerah. Dengan besaran PAD ini dapat menjadi tolak ukur kemampuan keuangan daerah yang dapat berkontribusi dalam pengoptimalan penganggaran pemerintah daerah setempat. Pada penelitian Rosalina Ayu Ketrin dkk (2022) menunjukkan PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Namun demikian

lain halnya pada penelitian Lambok Vera Riama Pangaribuan dkk (2018) menunjukkan PAD tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2022 Dana Alokasi Umum yang selanjutnya di singkat menjadi DAU merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. artinya bahwa dengan adanya DAU diharapkan dapat pemeratakan kemampuan keuangan dari masing-masing daerah. Namun demikian pelaksanaannya juga harus dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, serta potensi dari masing-masing daerah. DAU sendiri menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam penganggaran keuangan daerah. Hal ini dikarenakan DAU menjadi salah barometer dalam menentukan kemandirian suatu daerah. Pada penelitian Mawani Nasution dkk (2019) menunjukkan DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun berbeda pada penelitian Lambok Vera Riama Pangaribuan dkk (2018) menunjukkan hasil bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

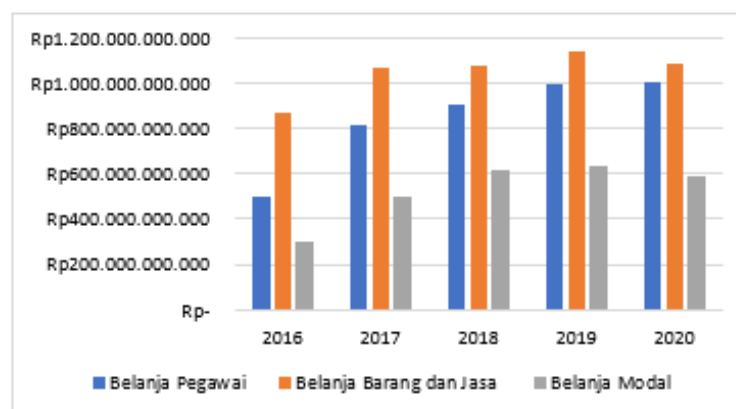
Sama seperti DAU keberadaan DAK juga menjadi penting bagi setiap daerah. DAK sendiri adalah dana yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Dana tersebut berfungsi untuk pendanaan kegiatan daerah yang berkaitan dengan kegiatan investasi pembangunan, pengadaan dan peningkatan serta perbaikan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik. Maka dari itu adanya DAK ini berperan penting dalam peningkatan terkait pelayanan jasa kepada masyarakat umum

yang dapat terealisasi melalui peningkatan belanja modal. Pada penelitian Maria dkk (2020) menunjukkan hasil penelitian bahwa dana perimbangan termasuk di dalamnya DAK secara parsial mempengaruhi alokasi belanja modal. Namun demikian berbeda dengan penelitian yang dilakukan Intan Yulita Nugroho dkk (2022) menunjukkan hasil bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Selain DAU dan DAK transfer dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat adalah DBH. DBH menjadi salah satu transfer dana dari pemerintah pusat dimana pengalokasiannya masuk kedalam struktur APBD. Dana ini dapat dioptimalkan untuk pembiayaan sebagai perwujudan desentralisasi daerah. DBH menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah yang memiliki potensi penerimaan yang tinggi yang dapat menjadi sumber modal utama bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan pembangunan daerah. Pada penelitian yang dilakukan Mawani Nasution dkk (2019) menunjukkan DBH memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun demikian berbeda pada penelitian Intan Yulita Nugroho dkk (2022) menunjukkan DBH tidak mempengaruhi belanja modal.

Belanja modal daerah merupakan pengeluaran Pemda untuk memperoleh aset untuk menambah kekayaan yang bermanfaat atau dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang yaitu paling sedikit kurun waktu 1 tahun periode di dalam akuntansi. Sebuah aset yang memiliki masa manfaat tentunya harus dirawat dan dipelihara dengan baik agar tetap berfungsi dan berguna sebelum habis masa manfaat dari aset tersebut. Maka

dari itu pengeluaran belanja modal akan selalu diiringi dengan pengeluaran biaya operasional yang merupakan bagian dari biaya pemeliharaan atas aset yang telah dimiliki. Belanja modal disebut juga sebagai sumber kekayaan daerah. Sebagai salah satu sumber kekayaan pemerintah, tentunya belanja modal ini harus dianggarkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Dengan perhitungan dan perencanaan yang matang terkait penganggaran belanja modal ini, tentunya akan berdampak baik bagi berjalannya pemerintahan di satu daerah. Dengan adanya perencanaan yang matang hal itu dapat diindikasikan pemerintah daerah telah memiliki rencana yang matang akan perkembangan daerahnya untuk jangka waktu kedepan. Dan itu merupakan satu indikasi yang baik dan positif yang mencerminkan pemerintahan yang peduli akan kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat luas. Namun pada kenyataannya anggaran belanja modal seringkali sedikit jumlahnya jika dilihat dengan anggaran belanja lainnya. Proporsi belanja daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016-2020, 5 tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel diagram berikut dibawah ini:



Gambar 1. 1 Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

Berdasarkan grafik data yang dipaparkan, diketahui dengan jelas proporsi alokasi belanja modal Provinsi Kepulauan Riau memang meningkat jumlahnya setiap tahunnya, akan tetapi anggarannya jauh lebih rendah. Dibandingkan dengan pengeluaran untuk barang & jasa serta pengeluaran untuk belanja pegawai. Artinya, dapat diindikasikan bahwa Otoritas Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Kepulauan Riau masih memprioritaskan pengeluaran yang bersifat konsumtif jika dibandingkan dengan pengeluaran yang bersifat produktif. Padahal seharusnya alokasi belanja modal lebih ditingkatkan kontribusinya sebesar mungkin. Hal tersebut dikarenakan belanja modal adalah elemen yang penting karena belanja modal salah satu elemen yang dapat menyentuh kepada masyarakat sebagaimana untuk kepentingan kesejahteraan dari banyak masyarakat. Jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk perolehan barang dan jasa serta biaya operasional untuk karyawan yang biasanya cenderung hanya akan menyentuh aparatur saja yang terkadang dana tersebut justru dapat disalahgunakan dan pada akhirnya tidak akan sampai kepada masyarakat. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait dengan belanja modal yaitu pada penelitian Mawani Nasution dkk (2019) menunjukkan DAU, DBH dan Pembiayaan Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun berbeda pada penelitian Lambok Vera Riama Pangaribuan dkk (2018) menunjukkan bahwa secara parsial PAD, DAU serta DAK tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Dalam penelitian ini, Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai variabel moderasi. Setiap daerah dikatakan berhasil jika masyarakatnya mengalami kesejahteraan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tingkat kesejahteraan dari masing-masing masyarakat di suatu daerah sendiri, dapat tercermin dari seberapa tinggi tingkat pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi yang baik (tinggi) harus didukung dengan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi di suatu daerah. Sehingga secara umum jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka dapat diindikasikan bahwa pemerintah daerah akan terus meningkatkan belanja modalnya dari tahun ke tahun. Guna melengkapi dan memperkuat pengaruh antara PAD, DAU, DAK serta DBH terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah, Maka peneliti memutuskan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. Dalam penelitian Fadhila Soesilo dkk (2021) diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki peran penguatan positif dan hubungan yang signifikan antara pendapatan daerah dan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki peran dalam memperkuat hubungan positif dan signifikan antara dana alokasi khusus dan belanja modal. Berbeda dengan penelitian Johannes Cosmas Simbolon dkk (2020) menunjukkan bahwasannya Pertumbuhan Ekonomi diketahui tidak dapat memoderasi pengaruh SiLPA, DAK dan DBH namun diketahui mampu memoderasi PAD dan DAU. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ada beberapa langkah yang tentunya dapat ditempuh pemerintah daerah setempat.

Diantaranya yaitu dengan meningkatkan jumlah investasi yang juga disertai dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai serta kepastian hukum. Salah satu caranya adalah dengan mengalokasikan anggaran pengeluaran untuk peningkatan aset daerah melalui belanja modal daerah lebih ditingkatkan jumlahnya dilakukan untuk memperluas aset di bidang yang dapat membawa dampak yang lebih bermanfaat atau menguntungkan di masing-masing daerah. Sektor produktif antar satu daerah dengan daerah lainnya tentunya tidaklah sama, maka dari itu sektor produktif ini bisa disesuaikan dengan masing-masing daerah.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia dengan penduduk 2.064.464 jiwa, dengan kepadatan 252 jiwa/km² dan 58% penduduknya berada di kota Batam. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara tetangga yakni Singapura, Malaysia dan Vietnam. Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau terletak di Tanjungpinang. Provinsi Ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut, dan udara yang strategis dan terdapat pada tingkat internasional serta pada bibir pasar dunia. Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki potensi sumber daya alam yang besar yang bersumber dari sektor maritim serta pertambangan. Seperti SDA mineral dan energi yang relatif cukup besar dan bervariasi baik berupa bahan galian A yang terdiri dari minyak bumi serta gas alam, bahan galian B seperti timah, bauksit dan pasir besi maupun bahan galian Golongan C seperti granit, pasir dan kuarsa. Dengan letak geografis yang strategis serta potensi SDA yang begitu besar, seharusnya dapat

mendorong pembangunan infrastruktur dan perekonomian masyarakat yang jauh lebih baik dibandingkan daerah lain. Namun demikian diketahui bahwa Provinsi Kepulauan Riau masih mengalami permasalahan terkait dengan ketimpangan pendapatan. Menurut Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau dalam website resminya memaparkan bahwasannya beberapa tahun terakhir sejak tahun 2016 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki permasalahan yakni adanya ketimpangan pendapatan penduduk perkotaan dan pedesaan. Pada tahun 2017 diketahui menurut Badan Pusat Statistik, ketimpangan daerah perkotaan meningkat 8,6% sedangkan pada pedesaan meningkat sebesar 2,5%. Adanya ketimpangan ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang ada di Kepulauan Riau diindikasikan hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat yang berada di golongan menengah ke bawah. Ketimpangan yang berkepanjangan akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pula pada meningkatnya jumlah penduduk miskin maka dari itu hal ini harus segera diatasi. Dengan adanya APBD dan alokasi belanja modal yang sudah diberikan pemerintah diharapkan dapat dijadikan stimulus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau yang mana ini akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan menampung penduduk yang menganggur. Dengan demikian akan pemeratakan pendapatan yang akan mengurangi jumlah ketimpangan dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka tentunya permasalahan di Provinsi Kepulauan Riau ini peneliti memandangnya penting untuk diobservasi lebih lanjut.

Sejumlah peneliti telah melakukan studi tentang hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi. Namun demikian hasil penelitian tidak mengarah pada kesimpulan yang sama. Penelitian yang dilakukan Yohannes Cosmos Simbolon dkk (2020) di Sumatra Utara menemukan bahwa PAD dan DAU memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pengalokasian belanja modal sedangkan SiLPA, DAK, dan DBH memiliki pengaruh positif dan signifikan. Pertumbuhan ekonomi diketahui tidak dapat memoderasi SiLPA, DAK dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal dan hanya mampu memoderasi Variabel PAD dan DAU terhadap belanja modal. Berbeda dengan temuan Noora Fahrunisah (2017) di Jawa Tengah mengemukakan bahwa PAD berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAU serta DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi diketahui juga hanya mampu memoderasi PAD terhadap belanja modal dan tidak mampu memoderasi DAU serta DAK terhadap belanja modal.

Terdapat hasil berbeda dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh sejumlah peneliti diatas, selain itu juga belum adanya penelitian tentang Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi di Provinsi Kepulauan Riau melainkan hanya di Provinsi Jawa Timur serta Sumatra Utara saja.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi Determinan Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Periode 2016 - 2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah, dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020?
2. Apakah Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020?
4. Apakah Dana Bagi Hasil Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020?
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi Mampu Memoderasi Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020?
6. Apakah Pertumbuhan Ekonomi Mampu Memoderasi Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020?

7. Apakah Pertumbuhan Ekonomi Mampu Memoderasi Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020?
8. Apakah Pertumbuhan Ekonomi Mampu Memoderasi Dana Bagi Hasil Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Berlandaskan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.
2. Mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.
3. Mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.
4. Mengetahui Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.
5. Mengetahui Pertumbuhan Ekonomi Mampu Memoderasi Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.
6. Mengetahui Pertumbuhan Ekonomi Mampu Memoderasi Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.

7. Mengetahui Pertumbuhan Ekonomi Mampu Memoderasi Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.
8. Mengetahui Pertumbuhan Ekonomi Mampu Memoderasi Dana Bagi Hasil Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.

Adapun manfaat penelitian yaitu:

- **Manfaat Teoritis**

Penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pembelajaran pada bidang pendidikan pada khususnya dalam pengembangan karya tulis ilmiah.

- **Manfaat Praktis**

Penelitian diharapkan mampu menjadi sumber acuan bagi pemerintah daerah setempat agar paham lebih jelas tentang pengalokasian belanja modal dan dapat menganggarkan dengan baik alokasi belanja modal di daerahnya.

D. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa sub bagian diantaranya sebagai berikut:

1. **BAB 1 Pendahuluan**

Sub bab pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan, tujuan serta manfaat penelitian. Aspek-aspek tersebut akan dijelaskan pada bab ini.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini dijelaskan landasan teori/tinjauan Pustaka, hipotesis dan kerangka berpikir. Tinjauan Pustaka yang dibahas terkait grand teori yang digunakan, dan penjabaran teori dari variabel yang digunakan.

3. BAB III Metode Penelitian

Pengujian akan dilakukan secara rinci pada bab metode penelitian. Peneliti akan menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian , setting penelitian, Teknik penarikan sampel, variabel, serta analisis data yang digunakan oleh peneliti.

4. BAB IV Pembahasan

Hasil pengujian yang termasuk dalam metodologi penelitian akan dijelaskan. Pada bab ini juga akan dipaparkan bagaimana hubungan satu variabel terhadap variabel lainnya. Pada bab ini juga akan melihat bagaimana variabel moderasi memperkuat hubungan kedua variabel yaitu bebas dan terikat, yaitu apakah variabel bebas mampu memperkuat pengaruh terhadap variabel terikat serta bagaimana bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

5. BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Bab penutup sendiri juga akan disertakan saran dari peneliti untuk penulis selanjutnya jika ingin mengamati atau melakukan penelitian pada tema ini. Pada bab ini juga akan ditemukan jawaban sebagai kesimpulan atas rumusan masalah yang sudah dijabarkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara bersama – sama PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Namun demikian secara parsial PAD, DAU, dan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hanya DAK yang memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan pada uji MRA diketahui pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh keseluruhan variabel yakni PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal.

B. Saran

Penulis dapat memberikan saran yang perlu dipertimbangkan dalam peningkatan belanja modal serta untuk para peneliti dalam rangka pengembangan penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1) Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menambahkan jumlah sampel penelitian sesuai dengan periode tahun terbaru agar menambah nilai kualitas dari penelitian yang dilakukan dan juga relevan dengan keadaan perekonomian pada tahun berjalan.

2) Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan realisasi dari anggaran APBD dan

TKDD diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan realisasi anggaran Belanja Modal yang baik pada periode tahun berikutnya. Hal tersebut dikarenakan penelitian yang dilakukan menunjukkan secara bersama-sama variabel PAD, DAU, DAK serta DBH mampu berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaning, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* , 3 (1), 1–37. <http://dx.doi.org/10.20473/jiet.v3i1.7874>
- Davis,J & Lex Donaldson. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Governance and Shareholder Returns. *Australia Journal of Management*, 16(1), 49-64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>.
- Fahrunisah, N., & Badjuri, A. (2017). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2015). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 6(2), 189–205.
- Fuad, K. (2017). Model Alokasi Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk Kemaslahatan Ummat. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 41-62.
- Hardiningsih, P., Januarti, I., Maryono, M., & Srimindarti, C. (2020). Capital Expenditure Determinants in Central Java and East Java with Economic Growth as Moderating Variable. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 35(1), 1. <https://doi.org/10.24856/mem.v35i1.1183>
- Huda,N. (2017). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Prenada Media : Surabaya.
- Intan Yulita Nugroho. (2022). Determinan Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Riset Ekonomi*, 2(3).
- Irawan, A., Chyntia Ovami, D., & Fitrah Gemilang Hasibuan, N. (2022). Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten di Sumatera Utara. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah* , 4(1). <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1791>
- Ishak, J., Sukmadilaga, C., & MulyanaAam Rachmat. (2020). Analisis Determinan Pengalokasian Belanja Modal. *Social and Humanities*, 6 (2), 9–16.
- Ketrin, R. A., & Sasongko, N. (2022). Determinan Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tahun 2018-2020. *Jurnal Akuntansi Publik*, 2(1).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV. Andi.
- Maria, M., Indriasari, D., & Nurhasanah, N. (2021). Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1).

- Marseno, B., & Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3452–3467.
- Nasution, M., & Sari Dewi, R. (2019). *Analisis Determinan Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan*.
- Pangaribuan, L. dkk. (2018). *Determinan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022. *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023*. Jakarta.
- Priadana, S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cetakan pertama). Tangerang Selatan : Pascal Books.
- Rosiana, Y.O. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Simbolon, Y. C., Maksum, A., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh PAD, SiLPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau Bengkulu Periode 2012-2018. *Jurnal Sains Sosio Humainora*, 4(2), 826-839.
- Sinaga, O. (2020). *Otonomi Daerah & Kebijakan Publik Implementasi Kerja Sama Internasional* (D. J. Iskandar, Ed.). Jakarta : Lepsindo .
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)* (Edisi II). UPP STIM YKPN .
- Soesilo, Alfina F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10 (4), 2-21.
- Sudarti, & Fitriana, N. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Jumlah Penduduk Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 332–345.
- Sugiyanto, H., & Kusumaningrum, E. B. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Fiscal Stress, Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 27 (2).

Sugiyono. (2003). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : CV. Alfabeta.

Tuwo, R. D., Rotinsulu, D. C., & Kawung, G. M. v. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Wulandari, D. Y., Dwi, A., & Bawono, B. (n.d.). (2021). *Prosiding Seminar Stiarni Analisis Determinan Atas Belanja Modal Desa (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019)*. 8(1). <https://bps.go.id/>